
Pelestarian Ekosistem Mangrove dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Saliki

Swadia Gandhi Mahardika¹, Faris Dwi Andhika², Tsaura An Nisa Salsabila³, Nuraeni Munayya Khofifah⁴, Muhammad Gunawan Yunus⁵, Soleha Mutmainnah⁶, Aldora Fahira Chermanda⁷, Nurul Hidayah Noviana⁸, Hajrah⁹, Juliana Lebang¹⁰

Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119 Kalimantan Timur, Indonesia¹

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119 Kalimantan Timur, Indonesia^{2,6}

Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119 Kalimantan Timur, Indonesia^{3,4,5,7}

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119 Kalimantan Timur, Indonesia^{8,9}

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119 Kalimantan Timur, Indonesia¹⁰

✉ Email Korespodensi: swdiamardika@feb.unmul.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 02-09-2025

Disetujui 14-09-2025

Diterbitkan 16-09-2025

Katakunci:

*Pelestarian Mangrove,
Pemberdayaan
Masyarakat,
KTH,
Ekosistem Pesisir,
Insentif Karbon*

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian ekosistem mangrove di Pulau Taddutan, Desa Saliki, Kutai Kartanegara. Melalui serangkaian sosialisasi, diskusi partisipatif, dan pendampingan, masyarakat dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Baji Minasa dilibatkan secara aktif dalam kegiatan penanaman mangrove serta pengelolaannya secara berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat mengenai manfaat ekologis dan ekonomis mangrove mampu memperkuat peran serta mereka dalam konservasi. Selain itu, terbentuknya kelembagaan KTH sebagai pengelola ekosistem mangrove lokal didukung oleh dukungan sosial dan fasilitasi dari tim pengabdian. Diharapkan, program ini mampu memberikan manfaat ekologis sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir melalui skema insentif berbasis karbon. Tantangan yang dihadapi meliputi persepsi masyarakat terhadap risiko dan manfaat, serta perlunya penanganan hama bagi pohon mangrove muda. Pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan

pelestarian ekosistem mangrove secara berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Swadia Gandhi Mahardika, Hajrah, Nurul Hidayah Noviana, Aldora Fahira Chermanda, Soleha Mutmainnah, Muhammad Gunawan Yunus, Nuraeni Munayya Khofifah, Tsaura An Nisa Salsabila, Faris Dwi Andhika, & Juliana Lebang. (2025). Pelestarian Ekosistem Mangrove dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Saliki. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(5), 1204-1213. <https://doi.org/10.63822/5b765214>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kawasan mangrove terluas di dunia, sehingga ekosistem ini memiliki arti strategis tidak hanya bagi perlindungan lingkungan pesisir, tetapi juga bagi keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional tahun 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 594 Tahun 2025, luas hutan mangrove Indonesia mencapai 3.440.464 hektare. Dari angka tersebut, terdapat sekitar 769.824 hektare habitat mangrove yang berpotensi untuk direhabilitasi atau ditanami kembali, menunjukkan bahwa tingkat degradasi ekosistem mangrove masih cukup tinggi. Legalitas dan perlindungan kawasan hutan menjadi hal yang esensial, sehingga pengelolaannya harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Indonesia sendiri memiliki kawasan hutan yang cukup luas yang tersebar di berbagai pulau. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999, kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap (Mahardika, 2021).

Ekosistem mangrove adalah wilayah pesisir yang ditumbuhi oleh pohon bakau, nipah, dan vegetasi sejenis lainnya, yang berfungsi sebagai pelindung garis pantai sekaligus menjadi habitat bagi berbagai biota perairan. Di Indonesia, ekosistem ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah (Apriani et al., 2022). Sebaran hutan mangrove meliputi hampir seluruh pesisir nusantara, dengan Kalimantan Timur menempati posisi keempat terluas yakni sekitar 240.870 hektare. Namun, provinsi ini sekaligus menyimpan potensi habitat mangrove yang dapat direhabilitasi sangat besar, yaitu 110.867 hektare. Fakta ini mengindikasikan adanya kerusakan serius, terutama akibat konversi lahan menjadi tambak, penebangan liar, maupun pembangunan permukiman. Oleh karena itu, Kalimantan Timur ditetapkan sebagai salah satu fokus program rehabilitasi mangrove nasional, termasuk melalui inisiatif Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) yang menargetkan pemulihan ekosistem di wilayah pesisir.

Kondisi kerusakan tersebut terlihat nyata di kawasan pesisir Delta Mahakam, Kutai Kartanegara (Kukar). Wilayah Kecamatan Muara Badak yang dulunya dikenal sebagai bentang mangrove yang lebat, kini semakin terbuka akibat ekspansi tambak. Untuk menjawab situasi ini, pemerintah pusat maupun daerah telah melaksanakan berbagai program pemulihan. Pada April 2021, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, melakukan penanaman sejuta pohon mangrove di Desa Saliki, Muara Badak, sekaligus mendirikan Pusat Informasi Mangrove (PIM) sebagai pusat edukasi. Program rehabilitasi di Kalimantan Timur menargetkan pemulihan seluas 27.244 hektare dalam kurun 2021–2024 dengan target tahunan sekitar 6.634–6.870 hektare. Namun, realisasi di lapangan masih menghadapi kendala, misalnya di Pulau Taddutan, Desa Saliki, di mana sekitar 30–50% kawasan masih belum tertanami mangrove

Upaya rehabilitasi dan perlindungan mangrove tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat secara langsung. Di sinilah Kelompok Tani Hutan (KTH) memiliki peran sentral. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-11/2014, KTH merupakan kumpulan petani atau masyarakat yang mengelola usaha kehutanan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, meliputi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, maupun jasa lingkungan. Peran KTH semakin penting karena mereka menjadi pelaku utama pembangunan kehutanan di tingkat tapak, misalnya melalui kegiatan pembibitan, silvofishery, agroforestry, hingga pemanfaatan jasa lingkungan.

Dalam konteks ini, hutan sebagai penyedia udara bersih dan penopang kehidupan makhluk hidup jelas memiliki nilai vital yang wajib dijaga. Konstitusi hukum Indonesia melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 juga menegaskan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah

untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Dengan demikian, perlindungan kawasan hutan termasuk mangrove bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban legal yang harus dijalankan secara kolaboratif oleh negara dan masyarakat.

Ekosistem mangrove sendiri memiliki fungsi ekologis yang tidak tergantikan. Vegetasi seperti bakau dan nipah berperan melindungi garis pantai dari abrasi, menjadi habitat berbagai biota perairan, serta mendukung rantai ekosistem pesisir. Selain nilai ekologis, mangrove juga bernilai ekonomis, baik sebagai objek wisata pesisir maupun sebagai sumber penghidupan masyarakat. Keberadaan ekosistem ini dengan demikian bersifat ganda dalam menopang lingkungan sekaligus kesejahteraan manusia. Karena itu, pelestarian melalui penanaman mangrove tidak hanya penting dari aspek ekologi, tetapi juga dari aspek sosial-ekonomi. Mangrove tidak hanya memiliki daya tarik sebagai destinasi wisata yang memberi manfaat bagi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai habitat penting bagi berbagai biota laut yang mendukung keberlangsungan ekosistem perairan. Peran ganda ini menjadikan keberadaan mangrove sangat vital, baik bagi ekosistem laut, komunitas pesisir, maupun industri pariwisata pantai. Oleh karena itu, upaya pelestarian melalui penanaman mangrove menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir (Srihermanto et al., 2023).

Salah satu model yang mendorong partisipasi masyarakat adalah perhutanan sosial, yaitu pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Perhutanan sosial tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian ekosistem, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Di Desa Saliki, Pulau Taddutan, misalnya, telah terbentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) Baji Minasa yang berperan aktif dalam pengelolaan mangrove. Kelembagaan ini muncul dari kesadaran masyarakat untuk menjaga sekaligus memanfaatkan sumber daya mangrove secara berkelanjutan, serta memperkuat posisi mereka dalam memperoleh manfaat ekonomi secara adil.

Meski demikian, peran KTH masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan pemahaman mengenai pengelolaan berkelanjutan, kurangnya akses informasi, dan ketidakmerataan pembagian manfaat antaranggota. Faktor-faktor tersebut sering kali menghambat optimalisasi peran masyarakat sebagai pengelola potensial ekosistem mangrove. Padahal, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan hutan merupakan cara efektif untuk memastikan kesejahteraan lokal tanpa mengurangi fungsi ekologis hutan. Salah satu cara membangun masyarakat di sekitar kawasan hutan adalah dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam pengelolaan hutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa mengurangi fungsi utama hutan itu sendiri (Wulansari et al., 2022)

Lebih jauh, keberlanjutan pengelolaan mangrove dapat diperkuat melalui skema insentif, misalnya dana karbon. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat memperoleh keuntungan finansial dari kontribusi mereka dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui konservasi dan restorasi. Dengan adanya skema tersebut, keberadaan KTH tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ekosistem, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi hijau berbasis ekosistem.

Berdasarkan realitas tersebut, diperlukan upaya sistematis berupa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bagi masyarakat Pulau Taddutan dan sekitarnya. Program ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya pelestarian mangrove sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penanaman dan pemanfaatan hasil hutan. Diharapkan, melalui peningkatan kapasitas masyarakat, rehabilitasi mangrove tidak hanya menghasilkan manfaat ekologis, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi komunitas pesisir.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan kunjungan lapangan ke kawasan mangrove di Pulau Taddutan, Desa Saliki, Kutai Kartanegara. Kunjungan ini dilakukan untuk mengamati langsung kondisi ekosistem mangrove, mencatat area yang masih terbuka maupun yang telah mengalami rehabilitasi, serta mengidentifikasi potensi sekaligus permasalahan yang terjadi di lapangan. Tahap awal ini penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai situasi aktual hutan mangrove sebelum dilakukan kegiatan penyuluhan dan diskusi bersama masyarakat.

Setelah melakukan observasi lapangan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi yang berfokus pada penyampaian materi mengenai fungsi ekologis dan ekonomis hutan mangrove, pentingnya peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan pesisir, serta peluang pengembangan usaha berbasis mangrove. Sosialisasi ini disampaikan oleh kami sebagai tim KKN Tematik Perhutanan Sosial dengan tujuan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem mangrove secara berkelanjutan

Tahapan berikutnya adalah diskusi partisipatif dengan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Baji Minasa dan masyarakat setempat. Dalam sesi ini, masyarakat diberi kesempatan menyampaikan aspirasi, keluhan, serta tantangan yang mereka hadapi, seperti persoalan alih fungsi lahan, keterbatasan bibit, hingga akses pendampingan yang masih terbatas. Diskusi tersebut menjadi sarana dua arah yang tidak hanya menyampaikan informasi dari tim KKN, tetapi juga menghimpun pengalaman langsung dari masyarakat setempat

Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya memperluas pemahaman masyarakat tentang peran strategis mangrove, tetapi juga memperkuat komunikasi antara masyarakat dan tim KKN dalam merumuskan solusi bersama. Dengan mendengar aspirasi serta menyaksikan langsung kondisi lapangan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan program lanjutan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ini dirangkum dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Baji Minasa melalui Kunjungan Lapangan, Sosialisasi, dan Diskusi Partisipatif dalam Upaya Pelestarian Ekosistem Mangrove di Pulau Taddutan, Desa Saliki, Kutai Kartanegara.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi terkait manfaat serta fungsi dari hutan mangrove di lakukan di masjid yang terletak di pulau Taddutan, Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak. Sosialisasi di lakukan secara langsung tatap muka dengan sasaran utama yaitu msayarakat yang tinggal di pulau Taddutan yang memiliki empang disana yang nantinya akan di lakukan penanaman pohon mangrove. Kegiatan di awali dengan kami semua mendatangi area yang akan dilakukan penanaman mangrove, mendalami program penanaman yang disampaikan oleh ketua Kelompok Tani Hutan Baji Minasa yaitu bapak Laode Makmur. Di lokasi penanaman mangrove kami dihelaskan terkait proses penanaman mangrove mulai dari asal bibitnya, proses penanaman, pihak yang terlibat, serta kendala yang dialami pada saat penanaman dilakukan.



Gambar 1

Setelah dari lokasi penanaman kami pun pergi ke masjid yang terletak di pulau Taddutan yang sering di gunakan oleh masyarakat sebagai tempat berkumpul. Sosialisasi di lakukan dengan materi yang dikemas dengan menggunakan bahasa yang sederhana dikarenakan kebanyakan dari masyarakat disana adalah pendatang yang berasal dari Sulawesi yang mayoritasnya bersuku Bugis dan Makassar. Setelah sesi penyampaian materi telah dilakukan selanjutnya kami melakukan sesi diskusi bersama warga Taddutan mengenai apa masalah atau kendala yang dialami oleh warga terkait penanaman mangrove tersebut.

Gambar 1. Menunjukkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait manfaat dan fungsi mangrove serta diskusi umum dengan masyarakat terkait kendala dan masalah yang di hadapi oleh masyarakat dalam hal penanaman mangrove. Masyarakat terlihat antusias menerima materi dan diskusi yang disampaikan melalui metode ceramah. Kegiatan ini melibatkan interaksi aktif antar masyarakat dan penyuluh, sehingga memudahkan pemahaman materi.

Dari sesi penyampaian materi dan diskusi terdapat beberapa hal yang menjadi masalah utama bagi masyarakat terkait penanaman mangrove di empang mereka. Masyarakat yang mayoritas adalah pengelola empang budidaya udang dan ikan bandeng menghadapi masalah pada saat perusahaan tambang masuk di sekitar wilayah mereka, yang awalnya waktu panen yang sekitar 4 sampai 5 bulan menjadi bertambah sekitar 7 bulan. Selain itu jumlah ikan dan udang yang terkena penyakit pun bertambah yang mengurangi hasil panen mereka. Dari permasalahan tersebut pemerintah masuk ikut serta mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menanam mangrove sebagai agen penyaring zat zat berbahaya yang ada di air demi memperbaiki kualitas air di sekitar pulau Taddutan.



Gambar 2

Dari program tersebut terbentuklah Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai lembaga yang membantu dalam proses penanaman mangrove tersebut. Namun dibalik adanya program tersebut terdapat penolakan sendiri dari masyarakat. Pertama, persepsi masyarakat yaitu jika pohon mangrove di empang semakin banyak maka panen ikan akan semakin sedikit di karenakan daun daun yang jatuh mengakibatkan pembusukan di kolam empang sehingga berdampak pada kesehatan ikan itu sendiri. Kedua, dikarenakan pohon mangrove muda tersebut sangat rawan dengan hama seperti ulat daun yang mana setelah ditanami maka jika pohon tersebut terkena hama ulat daun maka tidak akan lama bertahan. Ketiga, tidak adanya timbalbalik kepada masyarakat yang empangnya di gunakan sebagai tempat penanaman mangrove.

Dengan adanya permasalahan yang ada diatas perlu adanya peran lebih dari pemerintah atau pihak yang bersangkutan terkait pemberdayaan masyarakat terkait masalah tersebut. Yang pertama mungkin perlu adanya tenaga ahli yang turun langsung kelapangan untuk membimbing KTH serta penyuluhan secara berkala kepada masyarakat terkait permasalahan mangrove tersebut. Selanjutnya, perlu adanya sebuah intensif dari pemerintah itu sendiri kepada pemilik empang yang akan ditanami pohon mangrove tersebut sehingga pemilik empang tidak akan merasa dirugikan dalam program penanaman mangrove ini. Pemberian intensif kepada msayarakat ini dirasa perlu di lakukan sebagai pengganti jasa perawatan mangrove yang dilakukan oleh pemilik empang agar pohon mangrove yang dalam usia rawan akan terjaga dan terjamin keberlangsungannya.

Dengan adanya hal tersebut masyarakat akan lebih merasa diuntungkan dalam program di sini dan juga akan merasa lebih diberdayakan. Mulai dari tahap awal proses penanaman yang dilakuakn oleh seluruh masyarakat Taddutan, kemudian penentuan lokasi serta perawatan yang akan di laksanakan oleh pemilik empang. Dengan adanya kompensasi karbon yang diberikan oleh bank dunia, menurut (Irama et al., n.d.) Penerimaan negara dari emisi karbon yang dipergunakan khusus untuk membiayai program program yang

berhubungandengan emisi karbon seharusnya insentif yang diberikan kepada masyarakat bukan masalah kecil dalam hal ini.

Selain melakukan sosialisasi terkait permasalahan penanaman mangrove kepada masyarakat, KTH Baji Minasa sendiri memiliki beberapa masalah internal dalam kelembagaannya. Maka dari itu selain melakukan sosialisasi perhutanan, kami juga melakukan sosialisasi kepada internal kelembagaan KTH Baji Minasa untuk menyelesaikan masalah kelembagaan tersebut. Sosialisasi dilakukan secara langsung kepada ketua KTH yaitu Pak Laode Makmur di kediaman warga Handil yaitu Pak Faisal. Sosialisasi kami lakukan dengan pendekatan secara langsung dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Walau kehadiran anggota KTH yang minim sosialisasi berjalan dengan kondusif dan lancar.



Gambar 3

Ada beberapa masalah yang dialami oleh KTH Baji Minasa, yang pertama dan paling serius adalah ketidaktaktifan anggota dan beberapa pengurus inti yang menjadikan KTH kekurangan sumber daya

manusia sehingga menyulitkan kelompok untuk melakukan aktivitas. Masalah tersebut ditangani sementara oleh Ketua KTH dengan cara mengajak beberapa warga yang bukan merupakan anggota KTH untuk berpartisipasi dalam kegiatan KTH. Kendala selanjutnya yang dialami oleh KTH adalah tidak adanya ruangan atau gedung pertemuan untuk menunjang kegiatan KTH seperti penyimpanan peralatan, pelatihan, serta penyuluhan. Dirasa dengan adanya fasilitas tersebut dapat membantu kinerja KTH dalam menjalankan kegiatan mereka dilapangan nantinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian ekosistem mangrove di Pulau Taddutan, Desa Saliki, sangat penting dan memberikan dampak positif demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kegiatan sosialisasi mengenai manfaat ekologis dan ekonomis mangrove, serta pelibatan masyarakat dalam penanaman dan pengelolaan mangrove melalui forum diskusi dan pendampingan, mampu meningkatkan pemahaman warga terhadap pentingnya menjaga ekosistem mangrove secara berkelanjutan.

Selain itu, terbentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH) Baji Minasa sebagai lembaga yang aktif dalam pengelolaan mangrove dan hasil kegiatan seperti sosialisasi serta diskusi partisipatif merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan masyarakat. KTH tidak hanya berperan dalam kegiatan konservasi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi hijau berbasis ekosistem, serta sebagai ujung tombak dalam penerapan skema insentif berbasis karbon yang dapat memberikan manfaat finansial bagi masyarakat yang turut serta dalam program pelestarian ini.

Namun demikian, keberhasilan program ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti persepsi masyarakat mengenai potensi kerugian akibat penanaman mangrove, serangan hama pada pohon mangrove muda, serta ketidakseimbangan manfaat yang dirasakan antara masyarakat dan program konservasi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pendampingan dari tenaga ahli yang turun langsung ke lapangan, penyuluhan secara berkala, serta pemberian insentif yang cukup agar masyarakat tidak merasa dirugikan dan semakin termotivasi untuk turut aktif dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan mangrove.

Lebih jauh, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat setempat harus terus ditingkatkan. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui penguatan kebijakan, pemberian insentif, serta menyediakan fasilitas dan sumber daya yang mendukung keberlanjutan kegiatan. Disisi lain, masyarakat perlu diberikan akses informasi yang lebih luas serta pelatihan pengelolaan mangrove dan usaha berbasis ekologis yang mampu meningkatkan ekonomi lokal tanpa mengorbankan fungsi ekologis mangrove.

Secara umum, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui sosialisasi, diskusi, serta penguatan kelembagaan menjadi kunci utama dalam mencapai pelestarian ekosistem mangrove sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Keberlanjutan kegiatan ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pendukung lain agar ekosistem mangrove di Pulau Taddutan dapat terjaga dan memberi manfaat optimal bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Pada khususnya, kepada pemerintah setempat, Kelompok Tani Hutan Baji Minasa, serta masyarakat Pulau Taddutan yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan pengertian serta kerjasama selama kegiatan berlangsung. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada lembaga dan institusi terkait yang telah memberikan fasilitasi dan pendampingan guna keberhasilan program ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pelestarian ekosistem mangrove dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

REFERENSI

- Apriani, A., Akbar, A. A., & Jumiati, J. (2022). Valuasi Ekosistem Mangrove di Pesisir Kayong Utara, Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(3), 553–562. <https://doi.org/10.14710/jil.20.3.553-562>
- Irama, A. B., Iklim, P., Karbon, E., Negara, K., Karbon, P., & Berkelanjutan, P. (n.d.). *POTENSI PENERIMAAN NEGARA DARI EMISI KARBON: LANGKAH OPTIMIS MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA*. <http://dx.doi.org/10.31092/jia.v3i2.585>
- Mahardika, A. (2021). ANALISIS LEGALITAS PERHUTANAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ASAHAN. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 1. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK>
- Srihermanto, B., Rispawati, D., Tinggi, S., Administrasi, I., Stia, (, & Mataram,). (2023). SOSIALISASI MANFAAT MANGROVE DAN PENANAMAN POHON MANGROVE GUNA MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN PESISIR DI SEKITAR PANTAI WISATA LAWATA BIMA. *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(7). <http://bajangjournal.com/index.php/JPM>
- Wulansari, D., Abidin, Z., & Hafizianor. (2022). STRATEGI KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI WILAYAH KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) PULAU LAUT SEBUKU. *Jurnal Hutan Tropis*, 10. <http://dx.doi.org/10.20527/jht.v10i2.14126>